

MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS BANGSA INDONESIA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Oleh:

Iin Purnamasari, Qoriati Mushafanah
FIP IKIP PGRI SEMARANG

Abstract

Multicultural education as the cultivation of a way of life respect, sincere, and tolerant of the diversity of cultures living in a plural society. Multicultural education, it is expected the elasticity and suppleness of the nation facing mental impact of social conflict, so that the unity of the nation is not easy to crack. Multikulturalisme is an ideology that glorifies cultural differences, or a belief that recognize and promote the establishment of cultural pluralism as a feature of community life. Multiculturalism can be binding and mengakomodasi perbedaan bridge differences include differences in ethnicity and ethnic groups in a multicultural society. In the context of Indonesia, known for its cargo-laden diversity, multicultural education then be well placed to be able to manage diversity creatively, so that conflicts that arise as a result of transformation and social reform can be managed intelligently and be part of the enlightenment of the nation forward.

Abstrak

Pendidikan multikultural sebagai proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Kata Kunci : pendidikan multikultural, integritas

Suatu masyarakat dikatakan majemuk jika dalam masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat *diverse* (Nasikun, 1993:33). Hal tersebut ditandai dengan kurang berkembangnya sistem nilai dan konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan sering timbul konflik-konflik sosial atau kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Negara-negara bermasyarakat majemuk di berbagai

belahan dunia menghadapi persoalan klasik yang tiada henti menerpa, yakni terjadinya gesekan, ketegangan, dan konflik yang terkadang pemicunya bukan merupakan persoalan besar.

Konon, globalisme yang digulirkan oleh Negara-negara maju dipandang mampu mengatasi semua persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar negara berkembang, namun dalam kenyataannya justru berkontribusi memperlemah kekuatan negara, menyalakan disintegrasi bangsa, kebencian antar etnis, ras atau daerah, bahkan turut memporakporandakan jalinan kesatuan yang sudah dibangun oleh para pendiri negara sejak berabad-abad yang lalu. Bertolak dari persoalan tersebut, diperlukan upaya baik secara konseptual maupun praktis dalam merajut kebersamaan dalam entitas politik dan budaya melalui berbagai metode.

Kenichi Ohmae dalam bukunya yang berjudul *The End of the Nation State* mengemukakan bahwa keutamaan paham negara-bangsa (*nation state*) memberikan wacana mengenai pengelolaan kepentingan nasional dalam semangat dan visi global yang dilukiskan sebagai peradaban tanpa batas (*borderless world*). Empat “I S” (*investment, industry, information technology and individual consumer*) merupakan faktor penentu munculnya peradaban baru tersebut. Kecenderungan global yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi tidak bersifat fakultatif, tetapi merupakan fenomena yang harus dihadapi oleh setiap bangsa.

Dalam konsep negara-bangsa, kata negara dan bangsa bersanding seolah tidak ada permasalahan antara keduanya. Bangsa, kebangsaan, dan rasa persaudaraan, selalu menuntut pengakuan identitas, harga diri, dan semangat kederajatan bagi terbentuknya penyelarasan orientasi bersama. Hal ini disebabkan apabila para individu maupun kelompok memperlakukan pihak lain sebagai pihak yang tidak boleh dianggap remeh dengan alasan apapun. Rasa senasib sepenanggungan menjadi sangat penting bagi integrasi karena hal tersebut mengasumsikan adanya pluralitas dan heterogenitas (Utari: 2010:45). Tak terkecuali bangsa Indonesia, hingga kini masih dibayangi oleh aneka macam konflik yang bernuansa SARA. Untuk mengantisipasinya tentu saja membutuhkan sebuah paradigma pendidikan multikultural, yaitu sebuah paradigma pendidikan yang melembagakan pluralisme budaya dalam sistem pendidikan dengan mengedepankan prinsip persamaan, saling menghargai, menerima dan memahami serta adanya komitmen moral terhadap keadilan sosial. Tulisan di bawah ini berusaha membahas tentang kemajemukan yang akan berpotensi konflik jika terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan, namun akan berpotensi integratif yang tinggi manakala pemerintah, bangsa dan masyarakat mampu membina serta membenahi kebijakan demi kepentingan nasional.

KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA

Konsep masyarakat majemuk yang pada awalnya diperkenalkan oleh M.G Smith dan selanjutnya dipopulerkan oleh Furnival bertujuan untuk menyebut kelompok-kelompok etnik yang berbeda-beda namun saling berbaur. Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri dari aneka ragam kelompok masyarakat yang dilihat dari segi ras, agama, etnik, kebudayaan maupun bahasa. Berdasarkan pengertian di atas Indonesia termasuk salah satu negara yang jika dilihat dari segi keadaan masyarakatnya memiliki ciri majemuk. Dari segi ras, terdapat keanekaragaman yakni ras Mongoloid,

Kaukasoid, Negroid, dan ras campuran; terdapat pula aneka ragam suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, Melayu, dayak, Flores, Maluku, Papua dan masih banyak suku-suku bangsa kecil lainnya; ada berbagai pemeluk agama meliputi penganut Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan agama lokal atau aliran kepercayaan serta beraneka ragam bahasa daerah.

Koentjaraningrat dalam buku *Manusia dan Kebudayaan Indonesia* mengemukakan tentang keberagaman masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki cara hidup, nilai-nilai, perilaku dan hasil-hasil kebudayaan yang beragam. Kemajemukan tersebut sudah disadari sejak lama oleh para *founding fathers*. Oleh karena itu “bhinneka tunggal ika” rasanya bukanlah semboyan semata namun juga merupakan azas luhur bangsa yang harus direalisasikan pada saat ini hingga masa yang akan datang. Hal ini penting mengingat di masa lalu, konsep tersebut sangat disadari oleh para pemimpin bangsa, kaum terpelajar, dan politisi sebagai hal yang sangat penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi seiring dengan deras arus globalisasi, konsep itu telah dilupakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Akibatnya sering terjadi konflik-konflik sosial yang berakar dari perbedaan-perbedaan tersebut (Wasino, 2006).

Makna masyarakat Indonesia yang “bhinneka tunggal ika” dalam pandangan Suparlan (2003) mengalami pergeseran yang cukup berarti. Pada masa Orde Baru diartikan sebagai keanekaragaman suku bangsa dalam kebudayaan, tetapi dalam masyarakat multikultural Indonesia (*Indonesian Multikultural Society*) konsep tersebut diartikan sebagai keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia atau masyarakat majemuk (*plural society*). Pergeseran makna kebhinnekaan dalam masyarakat itu merupakan konsep ideologis khusus yang merujuk pada konsep multikultural. Tuntutan pengembangan multikulturalisme menjadi menguat di Indonesia, setelah berbagai daerah mengalami pergolakan antar etnis, adanya konflik kepentingan dan rasa ketidakadilan. Dengan pergeseran ini, masyarakat multikultural menjadi wacana yang sangat relevan dalam mengembangkan masyarakat Indonesia baru.

Salah satu ciri masyarakat multikultural adalah pengakuan perbedaan dalam kesederajatan, baik yang bersifat individual maupun bersifat kebudayaan. Masyarakat multikultural tumbuh diawali dengan adanya kesadaran bahwa hidup manusia dalam sebuah masyarakat dan kebudayaan bersifat pluralis. Disadari bahwa keragaman yang ada merupakan fitrah dan potensi untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pendekatan multikultural memuat asumsi setiap kebudayaan dan masyarakat mempunyai cara hidupnya sendiri-sendiri yang harus dipahami dari konteks dan kebudayaan yang bersangkutan.

Desain mengenai masyarakat multikultural di Indonesia telah dilakukan sejak lahirnya bangsa Indonesia yang pada saat itu sedikit banyak telah dipahami tentang substansi dari demokrasi. Penjelasan tentang kebudayaan bangsa dituangkan dalam pasal 32 UUD 1945 dengan pernyataan bahwa kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah. Meskipun dalam perkembangannya kebijakan politik kebudayaan nasional telah berpihak kepada para penguasa yang otoriter dan militeristik, sementara kebudayaan daerah yang menjadi satuan keunggulan etnik yang beragam ditiadakan, selanjutnya dijadikan kebudayaan propinsi. Berdasarkan fenomena di atas, pendidikan di Indonesia harus peka dalam menghadapi

arus perputaran globalisasi. Pola pemaksaan kehendak untuk membentuk satu kehidupan berbangsa yang seragam melalui aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan perlu ditinjau ulang dan dipertanyakan.

PENTINGNYA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, pendidikan multikultural merupakan jawaban atas problematika kemajemukan. Hal tersebut senada dengan paradigma tentang proses pendidikan yang didefinisikan sebagai proses pembudayaan dan cita-cita persatuan bangsa merupakan unsur budaya nasional. Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural juga dapat dijadikan sebagai strategi dalam mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya.

James Banks (1994) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai suatu keniscayaan (anugerah Tuhan/sunatullah). Selanjutnya bagaimana masyarakat mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Ruang pendidikan sebagai media *transfer of knowledge* hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam, baik latar belakang maupun basis sosio-budaya yang melingkupinya.

Pemikiran selanjutnya adalah tentang beberapa dimensi pendidikan multicultural yang saling berkaitan yaitu: pertama, *content integration* adalah mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Kedua, *the knowledge construction process*, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin). Ketiga, *an equity pedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pembelajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya maupun sosial. Keempat, *prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pembelajaran. Kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti olah raga, seni, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif (Mahfud, 2008).

Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Paulo Freire (2000), bahwa pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan, menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestis sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Pendidikan multikultural adalah proses penyadaran yang berwawasan sosial edukatif mencakup keragaman hidup beragama, sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan ini harus dilihat sebagai bagian dari usaha yang komprehensif untuk menanamkan pemahaman nilai-nilai toleransi, empati, simpati dan solidaritas sosial

dalam kerangka hidup bersama dalam suatu komunitas masyarakat multikultural. Sikap toleransi tidak mungkin tertanam dengan sendirinya tanpa adanya usaha sadar untuk menginternalisasikannya, dalam bentuk sosialisasi yang terus menerus dalam pendidikan.

Menurut Paul Gorski (2000), terdapat tujuan pendidikan multikultural yaitu mempengaruhi perubahan sosial yang melibatkan tiga pokok transformasi yaitu: pertama, transformasi diri, yang bertujuan mengenal identitas diri merupakan "*begining point*" yang menghubungkan guru, siswa, dan lingkungan yang menjadi pilar dasar dalam proses pembelajaran yang menuntut pemahaman tentang seluk beluk materi yang diajarkan. Kedua, sekolah dan persekolahan merupakan "*point of focus*" untuk mengerti dan menghargai identitas etnik yang melekat pada dirinya. Ketiga, transformasi masyarakat menuju pada perkembangan identifikasi global yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memandang bagaimana sebagai bangsa mereka membaur dalam masyarakat dunia.

Pendidikan multikultural di Indonesia belum menjadi kajian bidang ilmu pendidikan. Multikulturalisme baru menjadi wacana utama bidang antropologi, politik, dan sosiologi. Wacana dalam bidang pendidikan belum dikenal sebagai kajian substansial yang memberikan bobot fundamental dari sisi ontologi (objek kajian ilmu) dan aksiologi, karena ilmu pendidikan selama ini baru disikapi sebagai kajian normatif dari relasi hubungan guru dan siswa serta masyarakat dalam lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural harus berhasil membangun pemahaman dan upaya untuk hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun kolektif dan tidak terjebak dalam primordialisme budaya dan eksklusifisme kelompok agama atau budaya yang sempit.

Urgensi pendidikan multikultural belum nampak dari sisi pengembangan masyarakat ke arah penyadaran akan perbedaan-perbedaan yang ada. Menjunjung kemanusiaan dalam semua tindakan dan agenda aksi yang nyata dan bersifat membebaskan, harus menjadi esensi dari pendidikan multikultural. Jadi, urgensi pendidikan multikultural sangat penting karena berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik; hal lain dari pendidikan multikultural adalah agar siswa tidak tercabut dari akar budayanya; pendidikan multikultural juga dinilai relevan dengan alam demokrasi seperti saat ini. Untuk mewujudkan multikulturalisme dalam dunia pendidikan maka sangat dirasa perlu memasukkannya ke dalam kurikulum nasional.

MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS BANGSA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Amandemen untuk konstitusi Indonesia yang diperkenalkan sejak tahun 1999 telah menghasilkan perubahan artikel-artikel tertentu, yang dapat disajikan sebagai pondasi hukum yang perlu untuk implementasi pendidikan multikultural. Konstitusi Indonesia berisi bab hak asasi manusia yang terdiri dari 10 artikel yang antara lain menjamin hak kebebasan perlindungan dari perlakuan diskriminasi pada segala situasi, dan menghormati identitas kebudayaan dan hak komunitas tradisional. Gambaran lebih jelas dari hak asasi manusia dapat ditemukan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga meliputi artikel pada perlindungan berbagai bentuk diskriminasi dan perlindungan identitas kebudayaan dan hak kepemilikan tanah tradisional.

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban langsung kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan pada berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pusat pengembangan kurikulum departemen pendidikan nasional “Kurikulum Berbasis Kompetensi” yang digunakan pada tahun 2004 pada SD dan SMP di seluruh Indonesia (untuk keterangan lebih detail tentang kurikulum berbasis Kompetensi Indonesia, lihat Pusat Kurikulum Depdiknas 2002). Namun dalam perkembangannya kurikulum berbasis kompetensi ini kemudian dikembangkan lagi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kemudian pada isi kurikulum mengindikasikan bahwa porsi yang signifikan untuk pelajaran ilmu sosial tertentu akan disediakan untuk sifat multikultural masyarakat Indonesia. Dokumen Pusat Kurikulum menyatakan: “pendidikan multikultural dan multi bahasa” sebagai prinsip dari pengembangan kurikulum tersebut (lihat, Pusat Kurikulum Depdiknas, 2001).

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada beberapa prinsip seperti; menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang, didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah, kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda, mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, diantaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Bisa digarisbawahi, nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah toleransi. Maka toleransi harus dididikkan, tidak cukup berhenti pada wacana. Sebagai konsekuensinya, agar pendidikan lebih multikultural, maka pendidikan dan pengajaran harus memperkokoh pluralism dan menentang adanya rasisme, diskriminasi gender dan bentuk-bentuk lain dari intoleransi dan dominasi sosial. Pada konteks ini tentu harus dilakukan transformasi kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan peran guru menjadi multikultural. Menurut Gay’s dalam

Koentjaraningrat (1996), prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman, kurikulum tergantung pada konteks, bersifat menyerap keragaman dan dapat diterapkan secara luas dan bersifat komprehensif serta mencakup semua level pendidikan. Seorang pendidik bias menggunakan “payung multikultural” dalam membantu anak didik untuk memahami keterlibatan banyak kelompok dan keinginan di masyarakat.

Singkatnya, paradigma pendidikan multikultural perlu mewarnai model pembelajaran yang diterapkan dalam kelas. Sesuai prinsip pendidikan multikultural, maka aktivitas pembelajaran di sekolah disarankan untuk memberi perhatian pada kompleksitas dinamis dari berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi manusia, seperti fisik mental, kemampuan, kelas, gender, usia, politik agama, dan etnisitas. Para pendidik pada konteks ini disarankan menggunakan metode-metode yang bersifat antropologis untuk mengidentifikasi kelompok sosio budaya, nilai-nilai serta praktiknya yang mempengaruhi proses berkaryanya. Pada intinya pengajaran yang diharapkan adalah pengajaran “bebas dari prasangka” atau “Kurikulum Tanpa Prasangka”.

SIMPULAN

Pendidikan multikultural adalah proses penyadaran yang berwawasan sosial edukatif mencakup keragaman hidup beragama, sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan ini harus dilihat sebagai bagian dari usaha yang komprehensif untuk menanamkan pemahaman nilai-nilai toleransi, empati, simpati dan solidaritas sosial dalam kerangka hidup bersama dalam suatu komunitas masyarakat multikultural.

Pendidikan multikultural dapat menjadi salah satu model untuk mengatasi konflik SARA. Hal itu dapat dilakukan melalui kurikulum, pembelajaran di kelas dengan menggunakan mata pelajaran ilmu-ilmu sosial budaya dan keagamaan yang diharapkan mampu mencegah timbulnya konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, James A. 1994. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn Bacon
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta: LP3ES
- Gorski, Paul and Bob Cover. 2000. *Defining Multicultural Education*. <http://www.edchange.org/multicultural/initial.html>
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Nasikun. 1984. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of The Nation State (The Rise Of Regional Economies)*. New York: The Free Press
- Wasino. 2006. *Wong Jawa dan Wong Cina*. Semarang: Unnes Press